

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN UNGGULAN KOMPETITIF  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIRIAN BUMDes  
(Studi Di Beberapa BUMDes Di Kabupaten Musi Rawas, Sumsel)**



**Dr. Andy Alfatih, MPA / NIDN. 0024126003**

**Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si / NIDN. 0001016025**

**Randi, S.Sos, M.Sos/NIP. 199106172019031017**

Dibiayai oleh :  
Anggaran DIPA Badan Layanan Umum  
Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2020  
SP DIPA-023.17.2.677515/2020, Revisi 01 Tanggal 16 Maret 2020  
Sesuai dengan SK Rektor  
Nomor : 0685/UN9/SK.BUK.KP/2020  
Tanggal 15 Juli 2020

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

1.	Judul	:	Dampak Implementasi Kebijakan Pendirian BUMDes (Studi Di Beberapa BUMDes Di Kabupaten Musi Rawas, Sumsel)
2	Bidang Penelitian		Ilmu Sosial Humaniora
3.	Ketua Peneliti		
	a. Nama	:	Dr. Andy Al Fatih, MPA
	b. NIP	:	196012241990011001
	c. Pangkat/Gol	:	Lektor Kepala/V.a
	d. Jabatan Struktural		Wakil Dekan 3
	e. Jabatan Fungsional	:	Pembina Tk.I
	f. Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
	g. Jurusan	:	Sosiologi
	h. Keahlian	:	Sosiologi Kependudukan
	i. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Palembang – Prabumulih KM. 32 Ogan Ilir, 30662
	j. Telepon/Faks	:	Telp. (0711) 581077; 0711-580053
	k. Alamat Rumah	:	Kompleks Ogan Permata Indah Jl. OPI 2, Blok A. No. 24 Jakabaring, Palembang
	l. No Hp/Email	:	08127127112/ alfatihmpa@yahoo.com
4	Jumlah Anggota Peneliti	:	2 (dua) orang
5	Jangka waktu penelitian	:	1 (satu) tahun
6	Jumlah yang disetujui		Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)

Palembang, 27 November 2020

Mengetahui  
Dekan FISIP Unsri

Ketua Peneliti

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Dr. Andy Al Fatih, MPA  
NIP. 196012241990011001

Menyetujui,  
Ketua LPPM Unsri

Syamsuryadi, S.Si., M.Si., Ph.D  
NIP. 197102041997021003

## I. IDENTITAS

### a. Identitas Ketua Pengusul

1. NIDN : 0024126003
2. Nama Peneliti : Dr. Andy Alfatih, M.PA
3. Pangkat dan Jabatan : Lektor Kepala / IVa
4. Email Pengusul : [alfatihmpa@yahoo.com](mailto:alfatihmpa@yahoo.com)
5. Isian Curriculum Vitae :
  - a. Google Scholar :  
<https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=pOfGc9sAAAAJ>
  - b. The effectiveness of Kambang Iwak Besar park as a public space in Palembang City, Indonesia, *Advance Science Letters*, 23 (5), pp. 4904 - 4907, DOI : <https://doi.org/10.1166/asl.2017.8952>
  - c. Public policy of green open space development in Palembang City, Indonesia, *International Journal of Social Science and Humanity*, 8(2), pp. 55 - 58, DOI : <https://doi.org/10.18178/ijssh.2018.8.2.933>
  - d. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018. Laporan Penelitian kerjasama dengan Pemerintah Daerah Musi Rawas.
  - e. Implementasi Kebijakan Pendirian BUMDes di Kabupaten Musi Rawas. Laporan Penelitian Kompetitif Universitas Sriwijaya 2019.
6. Isian ID-Sinta : 6064155
7. Google h-Index : 0

### b. Identitas Anggota Pengusul

1. NIDN : 0001016025
2. Nama Peneliti : Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si
3. Pangkat dan Jabatan : Lektor Kepala / IVc
4. Email Pengusul : [dyah\\_enh@yahoo.co.id](mailto:dyah_enh@yahoo.co.id)
5. Isian Curriculum Vitae :
  - a. The effectiveness of Kambang Iwak Besar park as a public space in Palembang City, Indonesia, *Advance Science Letters*, 23 (5), pp. 4904 - 4907, DOI : <https://doi.org/10.1166/asl.2017.8952>
  - b. Public policy of green open space development in Palembang City, Indonesia, *International Journal of Social Science and Humanity*, 8(2), pp. 55 - 58, DOI : <https://doi.org/10.18178/ijssh.2018.8.2.933>
  - c. Implementasi Kebijakan Pendirian BUMDes di Kabupaten Musi Rawas. Laporan Penelitian Kompetitif Universitas Sriwijaya 2019.
6. Isian ID-Sinta : 6125816
7. Google h-Index : 1

### c. Identitas Anggota Pengusul

1. NIP : 199106172019031017
2. Nama Peneliti : Randi, S.Sos, M.Sos
3. Pangkat dan Jabatan : Penata Muda / IIIb
4. Email Pengusul : [randy@fisip.unsri.ac.id](mailto:randy@fisip.unsri.ac.id)

5. Isian Curriculum Vitae :
  - a. Google Scholar :  
<https://scholar.google.co.id/citations?user=gexpotsAAAAJ&hl=id&user=1>
  - b. Sinta :  
<http://sinta.ristekdikti.go.id/author/?mod=profile&p=stat>
  - c. The Role of Islam toward the Patriarchal Culture in Malay People, Sociology and Anthropology 5(12): 1027-1032, 2017, <http://www.hrpub.org> DOI : 10.13189/sa.2017.051207 <http://www.hrpub.org/download/20171130/SA7-19610084.pdf>
  - d. Indonesian Labor Marginalization : A Case Study on Street Vendors in Simpang Dago Market, International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (online): 2319-7064 Index Copernicus Value (2016): 79.57 Impact Factor (2015):6.391  
<https://www.ijsr.net/archive/v6i11/ART20177818.pdf>
  - e. Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia, DOI:  
<https://doi.org/10.24198/jsg.vlii.1185>
6. Isian ID-Sinta : 6693120
7. Isian H-Index : 1

#### **d. Identitas Usulan**

1. Rumpun Ilmu : Sosial
2. Bidang fokus penelitian : Sosial, Ekonomi, Hukum, Humaniora, Seni
3. Tema penelitian : Kajian Pembangunan Sosial Budaya
4. Topik Penelitian : Kearifan Lokal
5. Judul Penelitian : Dampak Implementasi Kebijakan Pendirian BUMDes
6. Status Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) penelitian dan target yang ingin dicapai : Validasi Komponen/Subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan
7. Skema penelitian : Kompetitif
8. Tahun usulan dan lama penelitian : 2020
9. Biaya yang diusulkan di tahun berjalan : Rp.48.000.000,-
10. SBK penelitian : Riset Terapan
11. Total biaya penelitian : Rp.48.000.000,-

#### **e. Lembaga Pengusul**

1. Nama unit lembaga pengusul : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Sebutan jabatan unit : Dekan
3. Nama pimpinan : Prof. Dr. Kgs. M. Sobri
4. NIP/NIK pimpinan : 196311061990031001

## **II. RINGKASAN**

Setelah melakukan kajian terkait implementasi pendirian BUMDes di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019, di tahun 2020 kajian ini memasuki fase untuk meneliti dampak pendirian BUMDes bagi masyarakat sekitarnya. Kajian terkait dampak keberadaan BUMDes ini pada akhirnya ditujukan untuk mendapatkan hasil evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam pendirian BUMDes, guna mendapatkan model alternatif bagi implementasi pendirian BUMDes selanjutnya, sejalan dengan peta jalan penelitian yang telah disusun.

Sejalan dengan tujuan tersebut maka kajian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah semua BUMDes yang ada di Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan data dari Sekretariat P3MD (Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa), per September 2019, terdapat lebih kurang 183 unit usaha BUMDes. Sampel dalam penelitian diambil 10 persen dari total populasi tersebut. Adapun, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sementara, teknik analisis data yang digunakan, yaitu teknik statistik deskriptif dan eksplanatif.

Luaran dari kajian ini nantinya akan dipublikasikan ke jurnal internasional bereputasi, salah satunya pada Scopus Indexed Journal, yaitu jurnal *Opcion* (Q3). Sejalan dengan tujuan penelitian, maka Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) dari penelitian ini masuk ke dalam kategori validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, yaitu pada dampak implementasi kebijakan BUMDes di Kabupaten Musi Rawas.

Kata – kata kunci : BUMDes, Implementasi, Kebijakan, Dampak

## **III. LATAR BELAKANG**

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Juga disebutkan dalam undang-undang sebelumnya, UU 22/1999 dan PP No. 1 Tahun 2005 tentang Desa. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di desa. BUMDes dikembangkan berdasarkan potensi desa, dan agar keberadannya tidak dikuasai oleh orang-orang tertentu (sejenis tengkulak, ijon dan lain-lain), maka kepemilikannya dimiliki bersama oleh suatu desa dan dikontrol bersama dengan

tujuan untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat, (Tim Penyusun, Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, 2007).

Oleh karena itu, tidak mengherankan saat ini banyak desa yang telah mendirikan BUMDes di berbagai pelosok desa di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumsel. Namun demikian, meskipun di beberapa kabupaten/kota di Sumsel, telah marak didirikan BUMDes, akan tetapi terdapat kabupaten/kota yang tidak memiliki BUMDes sama sekali karena merupakan wilayah perkotaan, yang tidak memiliki desa, melainkan kelurahan, misalnya Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau. Adapun, keberadaan BUMDes di Provinsi Sumsel, salah satunya direpresentasikan melalui BUMDes yang berada di Kabupaten Musi Rawas, yaitu sebanyak 183 BUMDes dari 185 desa, Sekretariat P3MD (Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa), 2019.

**Tabel 1.1. Jumlah BUMDes di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah BUMDes
1	STL Ulu Terawas	12	12
2	Jayaloka	12	12
3	BTS Ulu Cekar	18	18
4	Muara Kelingi	20	20
5	Tugumulyo	17	17
6	Muara Beliti	11	11
7	Muara Lakitan	19	17
8	Megang Sakti	19	19
9	Selangit	11	11
10	Purwodadi	9	9
11	Tiang Pumpung Kepungut	10	10
12	Tuah Negeri	11	11
13	Sumber Harta	9	9
14	Sukakarya	8	8
	Jumlah	185	183

Sumber : Sekretariat P3MD (Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa).

Maraknya pendirian BUMDes ini perlu dicermati lebih lanjut khususnya terkait dengan proses implementasi dan dampaknya. Tidak semua BUMDes berhasil menjalankan misi dan mencapai tujuan yang diinginkan. Fenomena inilah yang ingin dilihat lebih lanjut dalam kajian

ini, guna menemukenali bagaimana dampak dari keberadaan BUMDes itu sendiri. Kajian mengenai dampak perlu dilakukan sebagai bagian dari evaluasi terhadap implementasi dari kebijakan pendirian BUMDes yang telah dilakukan. Pada akhirnya kajian ini akan merumuskan model alternatif implementasi pendirian BUMDes yang dapat diterapkan. Adapun lokus kajian akan dilakukan pada beberapa BUMDes di Kabupaten Musi Rawas, mengingat beberapa BUMDes di wilayah ini, merupakan BUMDes percontohan yang dianggap berhasil.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah : bagaimana dampak pendirian dan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Musi Rawas?

### **Tujuan Khusus**

Secara khusus penelitian ini akan mendapatkan hasil analisis mengenai dampak dari implementasi kebijakan pendirian BUMDes di beberapa desa di Kabupaten Musi Rawas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi input dalam merumuskan model alternatif implementasi BUMDes.

### **Urgensi Penelitian**

Penelitian ini merupakan kajian yang menarik untuk diteliti. Isu keberhasilan pendirian BUMDes di beberapa desa menjadi *booming* dan wacana hangat di desa-desa lainnya, yang juga ingin mendirikan BUMDes, maupun BUMDes di beberapa desa yang belum berhasil. Oleh karena itu, kajian ini nantinya dapat menjadi input bagi desa-desa lainnya yang belum memiliki BUMDes, termasuk desa yang telah memiliki BUMDes tetapi belum berkembang dengan baik. Disamping itu hasil implementasi kebijakan akan menghasilkan rumus model alternatif implementasi pendirian BUMDes yang kelak dapat diterapkan. Hal ini dianggap penting karena BUMDes merupakan jembatan penciptaan kesejahteraan masyarakat desa.

## **IV. TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik, pada dasarnya merujuk pada berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, untuk kepentingan publik. Selama sumber-sumber publik menjadi fokus, kebijakan publik menjadi infrastruktur yang digunakan untuk memanfaatkan sumber-sumber publik. Tanpa kebijakan, pemanfaatan sumber-sumber publik adalah bertentangan dengan hukum. (Alfatih, 2015 : 2), menyatakan bahwa kebijakan publik dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik, menyelesaikan masalah publik, melakukan pemberdayaan, yang selanjutnya akan memberikan kesejahteraan sosial ke dalam kenyataan.

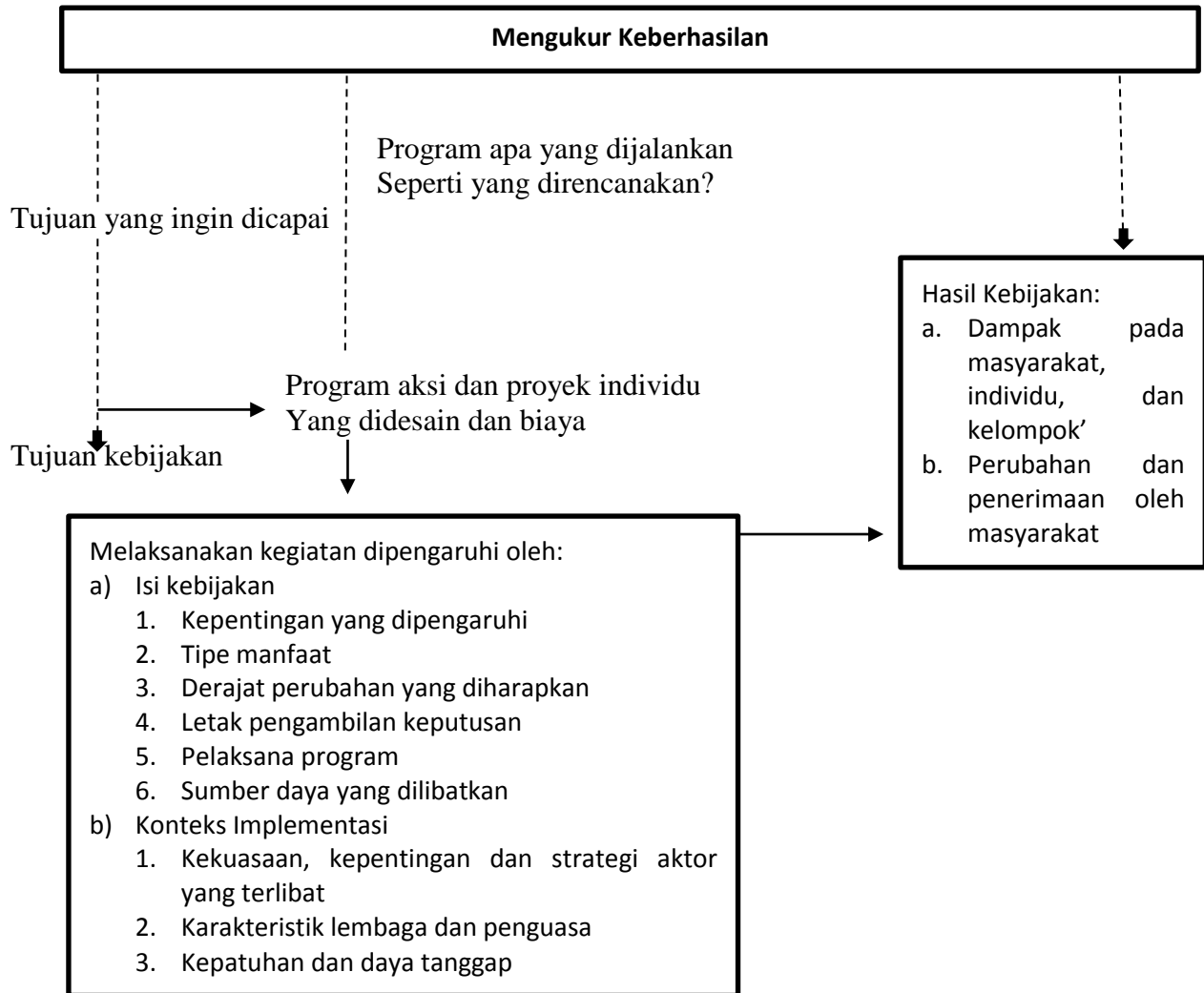
(Riant Nugroho, 2016) mendefinisikan administrasi publik ke dalam 5 tingkatan, yaitu Birokrasi, Pemerintah, Negara, *Governance*, dan *Global Governance*. Administrasi Publik dalam makna Pemerintah juga membuat Kebijakan Publik. Sebagai contoh, Presiden (Pemerintah/Eksekutif) membuat Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Pemerintah (PP), dan lain-lain. Pembuatan Kebijakan Publik oleh Administrasi Publik (Pemerintah/Eksekutif) ini dalam usaha memenuhi kewajibannya, yaitu memberikan pelayanan publik serta menciptakan kesejahteraan sosial, termasuk juga kebijakan pendirian BUMDes.

## **b. Model Kebijakan dan dampak**

Kebijakan dapat dikatakan berhasil atau tidaknya dapat dilihat dari hasil evaluasi kebijakan yaitu isi kebijakan dan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan menurut Grindle (1980) bahwa kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan sehingga implementasi kebijakan dapat dilakukan yang dilihat dari isi dan konteks kebijakannya (Wibawa, 1994). Implementasi yang akan dilakukan dalam isi kebijakan adalah; (1) kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, (2) jenis manfaat yang dihasilkan, dalam hal ini kebijakan memberikan manfaat yang actual (bukan hanya forma, ritual, dan simbolis), (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) siapa pelaksana program dan (6) sumber daya yang dikerahkan. Konteks kebijakan mempengaruhi proses Implementasi sebagaimana pengaruh dari kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya; (1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat, (2) Karakteristik lembaga dan penguasa, (3) Kepatuhan dan daya tanggap. Implementasi adalah tahap melibatkan serangkaian kegiatan yang meliputi pemberitahuan kepada public mengenai pilihan kebijakan yang diambil, instrument kebijakan yang digunakan, staf yang melaksanakan program,



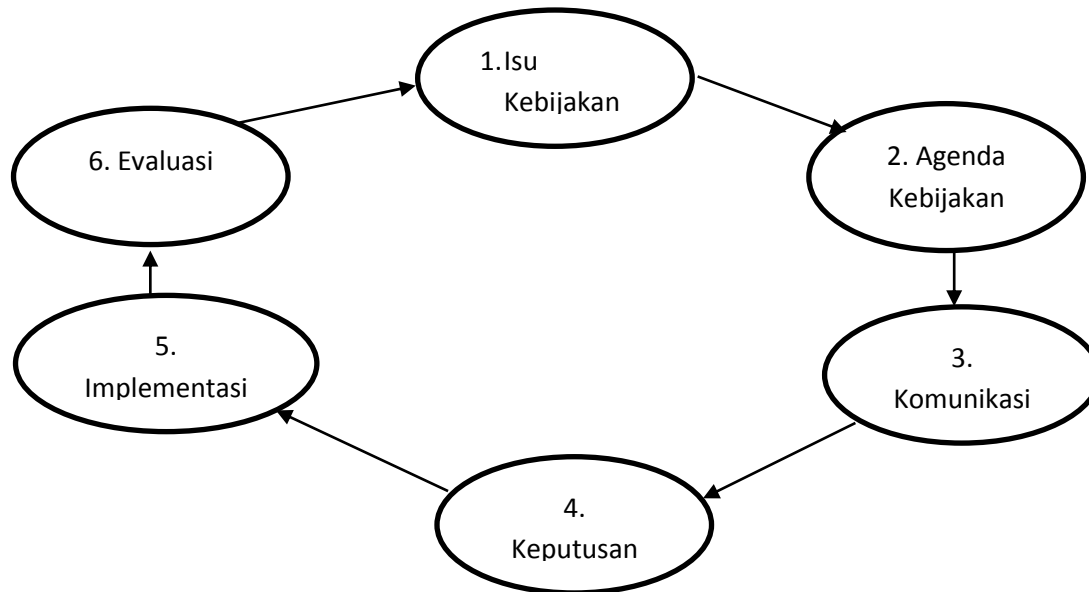
pelayanan-pelayanan yang diberikan, anggaran yang telah disiapkan dan laporan-laporan yang akan dievaluasi (Suharto, 2007).



**Bagan 1.** Model implementasi Kebijakan menurut Grindle, modifikasi

Menurut Putra (2005) dalam (Suharto, 2007) aktor menjadi hal yang terpenting dalam setiap kebijakan, Putra (2005) membagi stakeholder dalam tiga kelompok yaitu: 1) Stakeholder kunci: mereka yang memiliki kewenangan secara legal untuk membuat keputusan, 2) stakeholder primer: mereka yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program atau proyek, 3) stakeholder: mereka yang yang tidak memiliki kaitan kepentingan langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek, namun memiliki pedulian dan perhatian

sehingga mereka turut berpartisipasi untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Implementasi harus didasari oleh proses logis sehingga penting untuk dipahami proses logis dalam proses perumusan kebijakan. Berikut lingkaran kebijakan:



**Bagan 2:** Lingkaran kebijakan (Suharto, 2007)

Keenam lingkaran kebijakan diatas merupakan tahapan yang penting dilakukan untuk keberhasilan sebuah kebijakan, keberhasilan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan public yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan public serta dapat diterima oleh public (Aneta, 2010). Implementasi kebijakan sangat diperlukan dalam sebuah kebijakan dimana keberhasilan proses implementasi yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi, keempat faktor ini sangat penting (Akib, 2010). Keempat faktor tersebut memiliki persamaan dengan lingkaran kebijakan, namun lingkaran kebijakan melalui enam tahapan sehingga dirasa dibutuhkan waktu untuk menyusun sebuah kebijakan.

### c. Kajian Relevan

Kajian relevan terkait penelitian ini salah satunya dilakukan oleh Alfatih, dkk, 2019 dengan melihat aspek implementasi pendirian BUMDes di beberapa BUMDes di Kabupaten Musi Rawas. Desa-desa di Kabupaten Musi Rawas memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan menjadi BUMDes sehingga dapat memupuk kemandirian desa dan membuat desa lebih berdaya dari segi finansial. Artinya BUMDes memiliki peran penting dan bermanfaat bagi kemashlahatan warga desa. Sayangnya, belum semua desa memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi BUMDes. Oleh karena itu, kajian ini akan lebih spesifik melihat bagaimana dampak keberadaan BUMDes di beberapa desa yang sudah ada di Kabupaten Musi Rawas termasuk peluang keberhasilan dan kegagalan BUMDes yang telah didirikan.

Kajian lainnya dilakukan oleh Sumiasih (2018), dengan menganalisis eksistensi BUMDes pasca diundangkannya Undang-undang Desa dan menganalisis bentuk pengelolaan sektor pariwisata yang dapat difasilitasi oleh BUMDes. Metode kajian menggunakan perspektif hukum empiris. Data dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa eksistensi BUMDes setelah berlakunya Undang-undang Desa mengalami perkembangan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa desa yang memiliki potensi wisata, tetapi belum mendirikan BUMDes. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha serta kurang maksimalnya pendampingan dari pihak terkait, khususnya pemerintah. Adapun bentuk pengelolaan salah satu BUMDes yaitu BUMDes Pakse Bali adalah dengan memfokuskan pada sektor wisata, modal, pengelola, pola pengelolaan, strategi pemasaran, pertanggungjawaban dan pembagian hasil secara efektif dan terstruktur sehingga bisa dijadikan role model bagi desa lain yang belum memiliki kemampuan dalam mengelola potensi wisata di desanya.

Penelitian lain lebih menyoroti aspek bentuk keterlibatan perangkat dan masyarakat desa dalam memanfaatkan dana BUMDes, mengetahui pola pemanfaatan dana BUMDes dan untuk mengetahui kontribusi BUMDes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, (Prasetyo, 2016). Lokasi penelitian berada di Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Kajian dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur, dengan kuesioner kepada 50 responden. Hasil kajian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam dalam kegiatan BUMDes masih kurang. Hal ini disebabkan karena belum memadainya pengetahuan masyarakat terhadap program BUMDes.

Sementara, pola pemanfaatan dana BUMDes lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik di desa, oleh karena itu kontribusi BUMDes bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat masih dirasakan minim.

Sementara, kajian terkait implementasi BUMDes paling tidak terlihat pada kajian (Sufi dan Saputra, 2017). Kajian ini melihat implementasi program pemberdayaan desa dalam mendukung BUMDes, di Desa Dayang Suri, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Data yang digunakan adalah data sekunder. Sementara pengumpulan data secara langsung dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara kepada para informan kunci. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa program BUMDes Karya Bersama cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa, kurangnya transparansi dan kejelasan dari pihak penyelenggara keuangan, serta kurangnya peran fasilitator desa dalam memfasilitas pengambilan keputusan.

Pendirian BUMDes tidak terlepas dari potensi desa yang mungkin selama ini belum tergali. Oleh karena itu, kajian (Sidik, 2015), memperlihatkan bagaimana kemudian potensi desa ini digali atau dikembangkan guna mewujudkan kemandirian desa. Kajian ini menganalisis pelaksanaan desa wisata di Desa Bleberan, Kecamatan Pleyen, Kabupaten Gunung Kidul. Sebelum didirikan BUMDes, desa ini merupakan desa yang terisolir, kekurangan air, dengan angka kemiskinan yang tinggi. Desa ini kemudian menjadi berkembang dan menjadi desa wisata terbaik di Provinsi DIY setelah kemudian didirikan BUMDes. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun, analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan triangulasi data agar data lebih kredibel. Hasil kajian memperlihatkan sejak dibukanya desa wisata di Bleberan (2010-2014), terjadi peningkatan pendapatan asli desa secara signifikan. Salah satu aspek pendorong hal ini adalah berperannya modal sosial yang dimiliki warga yang berkembang sangat baik, seperti organisasi desa, kepercayaan, norma, dan jaringan. Hanya saja, belum transparan dan akuntabelnya penyelenggaraan BUMDes di desa ini, menjadi salah satu aspek kelemahan di sini.

Beberapa kajian tersebut menjadi rujukan bagi peneliti dalam merumuskan fokus kajian. Kajian-kajian tersebut juga memperlihatkan bahwa tema kajian terkait BUMDes memang sudah

banyak diteliti, karena keberadaan BUMDes sendiri memang telah menjamur di beberapa desa di Indonesia. Oleh karena itu, kesamaan kajian ini adalah pada tema besarnya yaitu terkait dengan BUMDes itu sendiri. Hanya saja fokus dan lokus kajian dalam penelitian ini tentu berbeda. Kajian ini difokuskan pada implementasi pendirian beberapa BUMDes di Kabupaten Musi Rawas, guna melihat aspek keberhasilan dan kelemahan dari masing-masing BUMDes. Pada akhirnya hasil evaluasi tersebut akan digali lebih lanjut, untuk merumuskan model alternatif implementasi BUMDes.

#### **d. Peta Jalan Penelitian (Road Map)**

Sebelum merumuskan kajian terkait BUMDes di perdesaan, sebelumnya tim peneliti telah melakukan kajian terkait tema serupa baik itu di wilayah perdesaan maupun di perkotaan. Kajian tersebut memang tidak spesifik BUMDes, melainkan terkait tema pengembangan potensi unggulan strategis daerah tertinggal, yang nantinya dapat dikembangkan menjadi BUMDes, dan juga terkait pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Berikut ini adalah peta jalan penelitian (road map) :

### Road Map

	TKT I	TKT II	TKT III	TKT IV	TKT V	TKT VI	TKT VII	TKT VIII	TKT IX	
2028										
2027										
2026										
2025										
2021 - 2024				Hibah kompetitif: Evaluasi Model Implementasi						
2021			Hibah Kompetitif :  Model implementasi kebijakan BUMDes							
2020			Hibah Kompetitif :  Dampak Kebijakan BUMDes							

2019		Hibah : unggulan kompetitif  Implementasi Kebijakan BUMDes, Faktor Pendorong Keberhasilan & kegagalan BUMDes							
2018	Riset Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Musi Rawas								
Luarar	• Kemitraan & Laporan Penelitian BUMDes Pemerintah Daerah Musi Rawas	• Scopus Indexed Journal of Social Sciences Research	• Scopus Indexed Journal : Opcion (Q3) - Scientific Information System	• Scopus Indexed Journal of Social Sciences Researc h	• Scopus Indexed Journal of Social Sciences Research				

## V. METODE

### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasarkan pada paradigma positivisme dan merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel (Neuman, 1997 : 63). Variabel-variabel ini diukur biasanya dengan instrument-instrumen penelitian, sehingga data yang terdiri dari angka-angka yang dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik (Creswell, 2016). Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif karena analisis dalam penelitian ini berdasarkan pada teori-teori yang sudah ada dan berhubungan dengan topik penelitian.

### b. Definisi Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator	No Pernyataan
a) Isi kebijakan	1. Kepentingan yang dipengaruhi 2. Tipe manfaat 3. Derajat perubahan yang diharapkan 4. Letak pengambilan keputusan 5. Pelaksana program 6. Sumber daya yang dilibatkan	a. Dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok' b. Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat	1. Kebijakan berdampak pada masyarakat, individu, dan kelompok. 2. Ada perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan
b) Konteks Implementasi	1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat 2. Karakteristik lembaga dan penguasa 3. Kepatuhan dan daya tanggap	a. Dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok' b. Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat	1. Kebijakan berdampak pada masyarakat, individu, dan kelompok. 2. Ada perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan



### **c. Unit Analisis**

Unit analisis penelitian ini adalah organisasi, dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Musi Rawas. Unit observasi dalam penelitian ini adalah pengurus dan pelaksana BUMDes yang dijadikan sampel dalam penelitian ini di Kabupaten Musi Rawas.

### **d. Populasi dan Sampel**

Populasi dari penelitian ini adalah semua BUMDes yang ada di Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan data dari Sekretariat P3MD (Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa), 2019. BUMDes Kabupaten Musi Rawas, per September 2019, terdapat lebih kurang 183 unit usaha. Sampel penelitian ini adalah 10 persen dari total populasi.

### **e. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ilmiah, agar data yang diperoleh terstandar dan baik, maka alat pengumpulan datanya, dalam hal ini *questionnaire* (kuesioner), haruslah akurat (*valid*) dan Presisif (*reliable*). Oleh karena itu perlu dilakukan kalibrasi instrumen, yaitu *questionnaire* (kuesioner) tersebut dalam rangka menciptakan adanya validitas dan reliabilitas instrumen tersebut. Kalibrasi instrumen dilakukan terhadap 20 responden.

#### **Pengujian Validitas Instrumen Penelitian**

Validitas menunjukkan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Jadi dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat *test*, maka alat *test* tersebut semakin mengenai pada sasarannya atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Suatu *test* dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila *test* tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur sesuai dengan makna dan tujuan diadakannya *test* tersebut. Jika peneliti menggunakan kuesioner di dalam pengumpulan data penelitian, maka butir-butir pernyataan yang disusun pada kuisisioner tersebut merupakan alat *test* yang harus mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian.

Salah satu cara untuk menghitung validitas suatu alat *test* yaitu dengan melihat daya pembeda item (*item discriminability*). Daya pembeda item adalah metode yang paling tepat digunakan untuk setiap jenis *test*. Daya pembeda item dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: “*korelasi item-total*”. Korelasi item-total yaitu konsistensi antara skor item dengan skor secara keseluruhan yang dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi antara setiap item dengan skor keseluruhan.

Pada penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi *product moment* dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{xiY} = \frac{n \sum XiY - \sum Xi \sum Y}{\sqrt{[n \sum Xi^2 - (\sum Xi)^2] \times [n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

$X_i$  adalah skor item pernyataan ke- $i$

$Y$  adalah total skor item pernyataan pada variabel yang diukur

Bila koefisien korelasi untuk seluruh item telah dihitung, perlu ditentukan angka terkecil yang dapat dianggap cukup “tinggi” sebagai indikator adanya konsistensi antara skor item dan skor keseluruhan. Dalam hal ini tidak ada batasan yang tegas. Prinsip utama pemilihan item dengan melihat koefisien korelasi adalah mencari harga koefisien yang setinggi mungkin dan menyingkirkan setiap item yang mempunyai korelasi negatif (-) atau koefisien yang mendekati nol (0,00), penelitian ini menentukan apakah butir pernyataan dapat dinyatakan valid digunakan harga koefisien korelasi yang minimal sama dengan 0,30.

### **Pengujian Reliabilitas Instrumen Penelitian**

Reliabilitas artinya adalah tingkat keterpercayaan hasil suatu alat pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (*reliable*). Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Kadang-kadang reliabilitas disebut juga sebagai keterpercayaan, keterandalan, keajegan, konsistensi, kestabilan dan sebagainya, namun ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya,

artinya sejauh mana skor hasil pengukuran terbebas dari kekeliruan pengukuran (*measurement error*). Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Walaupun secara teoritis, besarnya koefisien reliabilitas berkisar antara 0,00 – 1,00 akan tetapi pada kenyataan koefisien reliabilitas sebesar 1,00 tidak pernah dicapai dalam pengukuran, karena manusia sebagai subyek pengukuran psikologis merupakan sumber kekeliruan yang potensial. Di samping itu walaupun koefisien korelasi dapat bertanda positif (+) atau negatif (-) akan tetapi dalam hal reliabilitas koefisien reliabilitas yang besarnya kurang dari nol (0,00) tidak ada artinya karena interpretasi reliabilitas selalu mengacu kepada koefisien reliabilitas yang positif.

Teknik perhitungan koefisien reliabilitas yang digunakan disini adalah dengan menggunakan *teknik belah dua (split half)*. *Langkah-langkah perhitungan reliabilitas teknik belah dua (split half)* :

1. Membagi item-item menjadi dua belahan dengan dengan cara membagi item berdasarkan nomor ganjil genap. Item bernomor ganjil dimasukkan dalam belahan pertama, sedangkan yang bernomor genap dikelompokkan dalam belahan kedua
2. Skor untuk masing-masing item pada tiap belahan dijumlahkan. Langkah ini menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden, yaitu skor total untuk belahan pertama dan skor untuk belahan kedua.
3. Mengkorelasikan antara skor belahan pertama dan kedua dengan menggunakan korelasi product moment.

Selanjutnya perhitungan koefisien reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Reliabilitas} = 2 \times r / (1+r)$$

r = koefisien korelasi total skor belahan pertama dengan total skor belahan kedua.

Setelah nilai koefisien reliabilitas diperoleh, maka perlu ditetapkan suatu nilai koefisien reliabilitas paling kecil yang dianggap reliabel. Dimana disarankan bahwa koefisien reliabilitas antara 0,70 – 0,80 cukup baik untuk tujuan penelitian dasar.

## **f. Teknik Pengumpulan Data**

### **Penyebaran Kuesioner**

Teknik ini dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang telah disusun kepada para responden. Daftar pertanyaan itu berisi beberapa pernyataan, dimana para responden memilih salah satu jawaban yang dianggap mereka paling tepat jawabannya. Pernyataan-pernyataan berasal dari dimensi-dimensi dan indikator-indikator dari variabel dan digunakan untuk mengukur variabel. Skala yang digunakan adalah skala Likert dengan ketentuan: bila pernyataan positif (+) skalanya A – E dengan skor 1 sampai dengan 5. Namun bila pernyataan negatif (-), skalanya A – E dengan skor 5 samapai dengan 1. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

Pilihan-pilihan jawaban atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada para responden dengan ranking skornya:

#### **1. Pernyataan dalam kalimat positif (+):**

- |  |        |
|--|--------|
| A. Sangat Benar / Setuju /Sesuai       | skor 1 |
| B. Benar / Setuju /Sesuai              | skor 2 |
| C. Kurang Benar / Setuju /Sesuai       | skor 3 |
| D. Tidak Benar / Setuju /Sesuai        | skor 4 |
| E. Sangat Tidak Benar / Setuju /Sesuai | skor 5 |

#### **2. Pernyataan dalam kalimat negatif (-):**

- |  |        |
|--|--------|
| A. Sangat Benar / Setuju /Sesuai       | skor 5 |
| B. Benar / Setuju /Sesuai              | skor 4 |
| C. Kurang Benar / Setuju /Sesuai       | skor 3 |
| D. Tidak Benar / Setuju /Sesuai        | skor 2 |
| E. Sangat Tidak Benar / Setuju /Sesuai | skor 1 |

## **Catatan**

Menurut skala Likert pengukuran persepsi/sikap mempunyai 5 opsi, yaitu Sangat Setuju, Setuju, Kurang Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Tetapi untuk konteks pernyataan tertentu, jawaban dengan kata-kata tersebut tidak padu (link). Oleh karena itu, dipakai kata-kata lain yang lebih padan (*matching*) dengan pernyataan. Kata-kata yang dianggap lebih padan tadi, misalnya benar atau sesuai, merupakan substitusi dari kata yang dipakai Likert. Mengenai perbedaan, misalnya, antara sangat benar dengan benar adalah pada derajat persepsi/sikap yang dirasakan oleh responden. Contoh, bila pernyataan yang diajukan pas sekali dengan situasi atau kejadian yang berlangsung, kemungkinan besar responden akan menjawab sangat benar (tergantung pada seberapa kuat perasaan yang ada pada persepsinya). Sebaliknya bila pernyataan yang diajukan mengandung kebenaran, tetapi tidak pas seratus persen, maka ada kemungkinan responden akan menjawab benar. Kata: Benar, Setuju, atau Sesuai dipilih salah satu saja. Dicocokkan dengan konteks pernyataan.

## **Observasi**

Mengadakan pengamatan secara langsung tentang aktivitas kerja pada BUMDes yang diteliti. Kemudian dibuat suatu catatan-catatan. Data ini akan menunjang analisis data yang didapat dari jawaban kuisisioner.

## **Dokumentasi**

Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan cara mendapatkan data dari berbagai publikasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Publikasi tersebut, diantaranya, majalah, berbagai laporan, buku, data jumlah UKM, data terkait deskripsi wilayah Ogan Ilir dan lain-lain.

### **g. Teknik Analisis dan Verifikasi Data**

Penelitian ini adalah penelitian survei, dimana metode yang dipakai umumnya metode kuantitatif statistik, populasi/sample, unit analisis individu maupun organisasi/kelompok, dan teknik yang digunakan dapat berupa teknik eksploratif, deskriptif, eksplanatory/konfirmatory, evaluasi, prediksi, dan lain-lain (lihat Paschalis Riberu:2005: 4-5, Sugiyono: 2005: 14, dan juga

Mudrajad Kuncoro:2004:229-30). Untuk penelitian ini, dalam menganalisa data, teknik yang digunakan bervariasi, yaitu teknik statistik deskriptif, serta teknik eksplanatori.

### **Teknik Analisis Deskriptif**

Untuk rumusan masalah pertama, teknik analisis datanya adalah teknik deskriptif. Sedangkan metodenya yaitu metode kuantitatif. Deskriptif kuantitatif maknanya sama dengan statistik deskriptif. Syamsuddin (2002:01) dalam bukunya Statistik Deskriptif, menyatakan statistik deskriptif "merupakan kegiatan-kegiatan yang mencakup tentang pengumpulan data, pengolahan, dan penyajian data dalam bentuk yang baik agar mudah dianalisis dan penganalisisan data secara deskriptif". Menurut Mudrajat Kuntoro (2004: 1 – 51) dalam bukunya Metode Kuantitatif, teknik statistik deskriptif adalah suatu studi yang menggunakan metode numerik dan grafis untuk mengenali pola sejumlah data, merangkum informasi yang terdapat dalam data tersebut, dan menyajikan informasi tersebut dalam bentuk yang diinginkan. Teknik ini berawal dari data yang dikumpulkan, diproses dan dimanipulasi menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan. Pemrosesan dan manipulasi data mentah menjadi informasi yang bermanfaat inilah yang merupakan jantung dari analisis kuantitatif.

Data yang sudah dikumpulkan dan diproses dapat disajikan dalam berbagai bentuk, misalnya grafik batang maupun grafik serabi (pie), tabel frekuensi, *histogram*, *stem and leaf display*, *arithmetic mean*, *modus*, perbandingan, dan lain-lain.

### **Teknik Analisis Eksplanatif**

Teknik analisis eksplanatif digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang kedua. Analisis yang akan digunakan disesuaikan dengan hipotesis penelitian yang diajukan. Hipotesis mengisyaratkan adanya pengaruh eksogen (X) terhadap variabel endogen (Y). Oleh karena itu analisa yang tepat adalah Analisis Jalur (*path analysis*). Analisis Jalur (*path analysis*) digunakan karena adanya hubungan keeratan antara X1, X2 dan X3 atau terdapat hubungan korelasi antara X1, X2 dan X3.

Tahap-tahap penyusunan analisis jalur adalah sebagai berikut :

1. Model analisis jalur berangkat dari asumsi bahwa model yang disusun sudah merupakan model kausal / *recursive* atau *indirectional*.

2. Disamping pengujian kausalitas, pengujian linieritas harus dilakukan, karena linieritas merupakan salah satu persyaratan analisis jalur.
3. Setelah kelengkapan dan persyaratan model analisis jalur dipenuhi, selanjutnya memeriksa kelengkapan substruktur/ hipotesis.
4. Tahap selanjutnya adalah pendugaan/perhitungan koefisien jalur dan kontribusi pengaruh baik untuk substruktur/hipotesis, maupun untuk model keseluruhan.
5. Koefisien determinasi yang layak untuk suatu model adalah  $R^2 = 0,60$  (untuk mengeliminasi pengaruh error dari luar), tetapi bisa juga  $R^2 = 0,50$  sudah baik (*with cross sectional data 0,5 might be considered a reasonably good fit*).

Analisis jalur digunakan untuk menganalisa hubungan kausal antara satu atau beberapa variabel penyebab (*independent variable*) dengan satu variabel akibat (*dependent variable*). Hubungan antar variabel dalam analisis jalur ada 2 (dua) yaitu :

1. *Pengaruh Langsung* biasanya digambarkan dengan panah satu arah dari satu variabel ke variabel lainnya.
2. *Pengaruh Tidak Langsung* biasanya digambarkan dengan panah satu arah pada satu variabel pada variabel lain, kemudian dari variabel lain panah satu arah ke variabel berikutnya.

Ada beberapa asumsi yang harus selalu diperhatikan dalam menggunakan analisis jalur yaitu :

1. Hubungan antara variabel haruslah linier dan aditif
2. Skala pengukuran semua variabel sekurang-kurangnya interval

Menurut persyaratan analisis jalur, fakta numerik yang bisa dianalisis adalah fakta numerik dengan tingkat pengukuran sekurang-kurangnya interval. Data dikumpulkan atas dasar items yang memenuhi tipe Likert. Data ini mempunyai tingkat pengukuran ordinal. Oleh karena itu data harus dinaikkan ke atas interval melalui *method of successive intervals*.

Karena data yang dihasilkan dari penelitian masih berskala ordinal, sedangkan untuk keperluan analisis jalur diperlukan skala pengukuran data minimal interval, maka data yang

dalam skala ordinal tersebut ditransformasi terlebih dahulu ke skala interval menggunakan *method successive interval* (MSI) dengan langkah perhitungan sebagai berikut :

1. Perhatikan tiap butir pertanyaan, misal dalam kuisioner
2. Untuk butir tersebut, tentukan berapa banyak orang yang mendapatkan (menjawab) skor 1,2,3,4 dan 5 yang disebut dengan *Frekuensi*
3. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut dengan *Proporsi*.
4. Tentukan Proporsi Kumulatif.
5. Dengan menggunakan Tabel Distribusi *Normal Baku*, hitung nilai  $Z_{tabel}$  untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh.
6. Tentukan *Nilai Densitas* untuk setiap nilai  $Z$  yang diperoleh.
7. Tentukan *Nilai Skala* dengan menggunakan rumus :

$$\text{Nilai Skala (NK)} = \frac{\text{Density at Lower Limit} - \text{Density at Upper Limit}}{(\text{Area Below Upper Limit} - \text{Area below Lower Limit})}$$

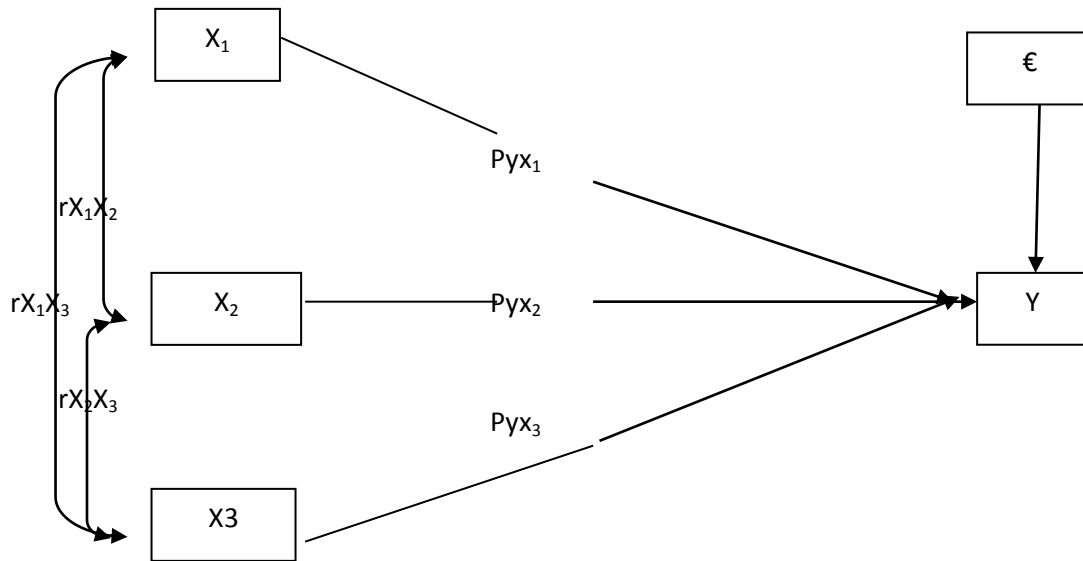
8. Tentukan *Nilai Transformasi (Y)* dengan menggunakan rumus :

$$Y = NS + k$$

$$K = 1 + [ NS_{\min} ]$$

Sebelum peneliti melakukan analisis jalur (*path analysis*), maka akan digambarkan terlebih dahulu pola hubungan (*correlation pattern*) antar variabel penyebab (*independent variable*) dan variabel akibat (*dependent variable*) yang didasarkan pada teori-teori implementasi dan kinerja yang mendasari pola hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.





Gambar 3.1.  
Metode Analisis Jalur

## VI. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Penelitian ini menganalisis tentang dampak Kebijakan BUMDes di Kabupaten Musi Rawas di tahun 2020. Hasil dari kajian ini akan dipublikasikan ke dalam *Scopus Indexed Journal of Social Sciences Research*. Luaran lainnya dari kajian ini adalah terbangunnya jejaring kerjasama antara peneliti dan pihak pemerintah desa di beberapa BUMDes yang menjadi sasaran kajian. Jejaring ini telah terbangun sebelum penelitian dilakukan (sebelum tahun 2019), melalui kajian terkait BUMDes di beberapa desa sasaran kajian, maka jejaring ini maka peneliti akan lebih dipererat lagi, sehingga memungkinkan adanya kerjasama di tahun-tahun berikutnya (2020 dan seterusnya).

Setelah hasil kajian diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah mengkaji mengenai Model Implementasi Kebijakan BUMDes untuk dikirim ke jurnal internasional terindeks scopus dengan adanya model implementasi kebijakan BUMDes, maka di tahun 2021 akan dilaksanakan penerapan Model Implementasi Kebijakan BUMDes dan akan dipublikasikan ke *Scopus Indexed Journal of Social Sciences Research*. Kemudian pada tahapan akhir dari kajian ini adalah mendapatkan hasil evaluasi dari penerapan model implementasi kebijakan BUMDes di

kabupaten Musi Rawas, yang akan dipublikasikan ke *Scopus Indexed Journal of Social Sciences Research* di tahun 2024.

## VII. ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

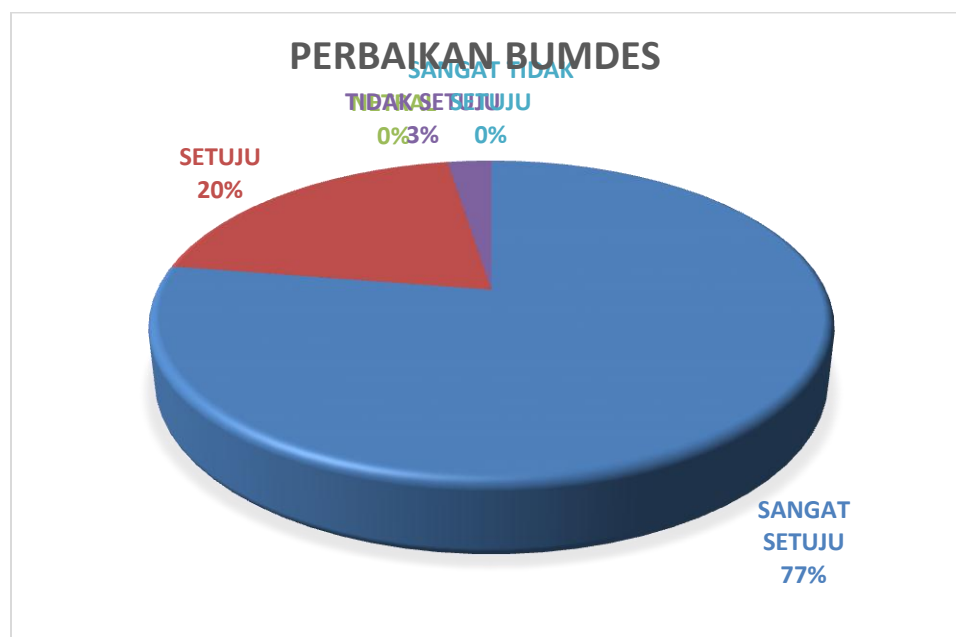
Berikut ini adalah data yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada 40 Badan Usaha Milik Desa.

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
<b>ASPEK EKONOMI: PENINGKATAN MODAL USAHA</b>							
1	Bantuan Modal	1	0	0	25	14	40
2	Bantuan Pelatihan	26	14	0	0	0	40
3	Bantuan pendampingan	39	0	1	0	0	40
4	Bantuan Usaha pihak lain	0	13	0	17	10	40
5	Pinjaman Usaha untuk pengembangan	0	0	4	19	17	40
<b>EKONOMI: KEMAJUAN USAHA</b>							
6	Perbaiki tempat usaha	31	8	0	1	0	40
7	Produk usaha meningkat	22	12	0	6	0	40
8	Teknologi, peralatan, perlengkapan dan usaha	17	0	1	18	4	40
9	Pemasaran Produk makin luas	15	1	2	15	7	40
10	Permintaan Pasar luas	33	0	2	3	2	40
<b>ASPEK EKONOMI: KEUNTUNGAN USAHA</b>							
11	Usaha menguntungkan	40	0	0	0	0	40
12	Keuntungan usaha meningkat	25	15	0	0	0	40
<b>ASPEK SOSIAL: KETERKAITAN SOSIAL DENGAN BUMDES</b>							
13	Memiliki jabatan penting	39	1	0	0	0	40
14	Masyarakat respek pada jabatan	36	1	3	0	0	40
15	Peningkatan usaha sejak memimpin	40	0	0	0	0	40
<b>ASPEK SOSIAL: KEIKUTAN ASOSIASI</b>							
16	Bergabung dengan asosiasi	34	0	0	1	5	40
17	Menjadi jabatan/pengurus di asosiasi	0	0	0	24	16	40
18	Asosiasi tingkat kabupaten	35	0	0	2	3	40
<b>ASPEK SOSIAL: TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP BUMDES</b>							
19	Masyarakat mendukung BUMDes	21	19	0	0	0	40
20	Masyarakat tidak peduli sama BUMDes	0	0	4	13	23	40
21	Masyarakat menolak BUMDes	0	0	0	25	15	40
<b>ASPEK LINGKUNGAN: KETERSEDIAAN BAHAN BAKU USAHA</b>							
22	Bahan baku dari desa	12	5	4	3	16	40
23	Bahan baku alam	5	3	16	11	5	40

24	Kemudahan mendapatkan produk	13	9	2	7	9	40
ASPEK LINGKUNGAN: PERLAKUAN SISA BAHAN BAKU PRODUKSI							
25	Menyisahkan bahan baku (limbah)	0	22	3	9	6	40
26	Limbah bahan baku di daur ulang	0	20	11	6	3	40
27	Limbah dibuang sembarang	0	1	7	16	16	40
ASPEK POLITIK: KETERLIBATAN UNSUR PАРPOL							
28	Unsur parpol pendirian BUMDes	0	0	0	0	40	40
29	Bentuk keterlibatan parpol	0	0	0	0	40	40
30	Unsur parpol intens	0	0	0	0	40	40
ASPEK POLITIK: AFILIASI/MENJALIN HUBUNGAN DENGAN PАРPOL							
31	Hubungan khusus dengan parpol	0	0	0	0	40	40
32	Pengurus dari parpol	0	0	0	0	40	40
33	BUMDes mewakili kepentingan parpol	0	0	0	0	40	40
34	Pengarahan yang mengarah ke parpol	0	0	0	0	40	40

Sumber: Data lapangan diolah peneliti, 2020

Dari tabel di atas jelas bahwa peran pemerintah sangat penting dalam pengkataan BUMDes di Musi Rawas. Baik dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan BUMDes secara mandiri berkembang. Disamping itu kemajuan usaha juga dirasakan oleh BUMDes yang ada di kabupaten Musi Rawas berikut diagram lingkaran:

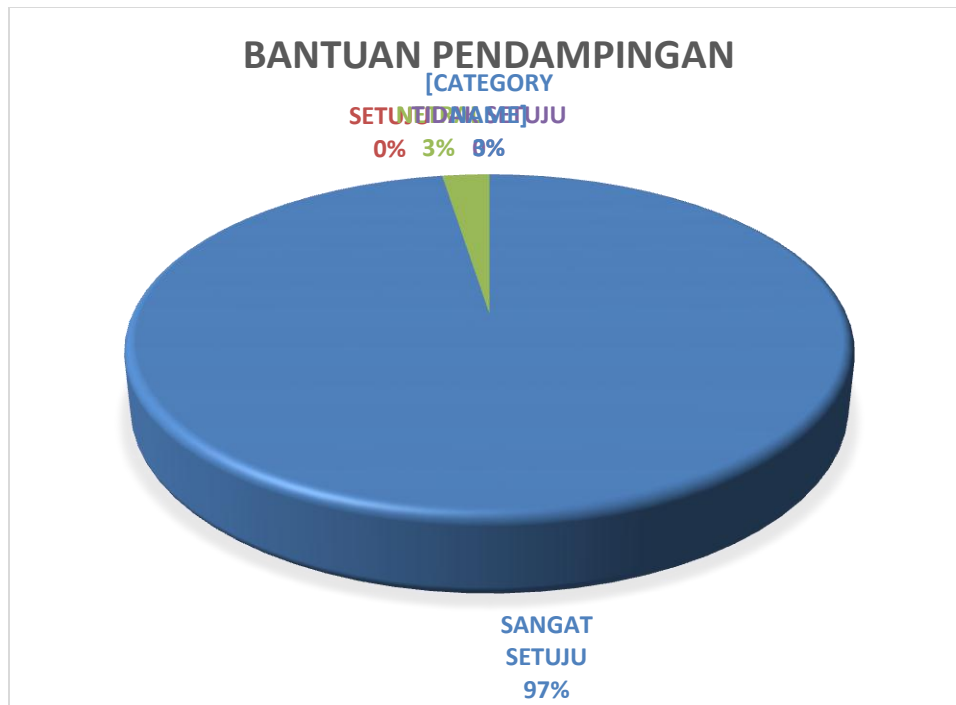


Sumber: Data lapangan diolah oleh peneliti, 2020

Aspek ekonomi terkait dengan kemajuan usaha, 77% informan sepakat bahwa BUMDes yang mereka kelola mengalami kemajuan. Kamajuan ini dapat didukung dari beberapa faktor yaitu bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan ada asosiasi yang diikuti oleh BUMDes, salah satu asosiasi yang diikuti adalah Forum BUMDes Indonesia di kabupaten Musi Rawas. Sehingga dengan bantuan tersebut BUMDes di Musi Rawas 100% mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalani. Meskipun banyak BUMDes baru mengalami pergantian kepemimpinan namun BUMDes terus berjalan dan mendapatkan keuntungan, hal ini dibuktikan dengan semenjak kepemimpinan baru BUMDes tetap mengalami perkembangan yaitu sebesar 100% informan menyatakan mendapatkan peningkatan.

Keberadaan BUMDes bagi masyarakat adalah sebuah solusi yang ditawarkan dalam kondisi masyarakat yang susah dalam mendapatkan produk yang mereka inginkan, dengan menjadi konsumen maka secara tidak langsung BUMDes dan masyarakat saling menguntungkan. Masyarakat terbantuan dengan keberadaan BUMDes. Peran masyarakat tidak kalah penting dalam proses perkembangan BUMDes. Masyarakat adalah aktor yang cukup penting bagi BUMDes. Menurut Putra (2005) dalam (Suharto, 2007) aktor menjadi hal yang terpenting dalam setiap kebijakan, Putra (2005) membagi stakeholder dalam tiga kelompok yaitu: 1) Stakeholder kunci: mereka yang memiliki kewenangan secara legal untuk membuat keputusan, 2) stakeholder primer: mereka yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program atau proyek, 3) stakeholder: mereka yang yang tidak memiliki kaitan kepentingan langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek, namun memiliki pedulian dan perhatian sehingga mereka turut berpartisipasi untuk mempengaruhi keputusan pemerintah.

Adapun dari aspek pendampingan, dapat diketahui bahwa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada BUMDes sehingga dengan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah BUMDes mengalami peningkatan baik kemandirian maupun keuntungan BUMDes. Data di atas adalah hasil dari lapangan yang diolah oleh peneliti. Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten memberikan bantuan kepada BUMDes. Beberapa bantuan yang diberikan adalah berupa pendampingan, pelatihan dan modal. Aspek ekonomi peningkatan modal usaha BUMDes di kabupaten Musi Rawas cukup baik yaitu BUMDes banyak mengalami peningkatan setelah adanya bantuan pendampingan dari pemerintah.



**Sumber: Data lapangan diolah oleh peneliti, 2020**

Bila digambarkan dalam diagram lingkaran bantuan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah dengan jumlah 97% informan sepakat bahwa BUMDes mendapatkan bantuan pendampingan. Bantuan pendampingan ini dimanfaatkan oleh pengelola BUMDes untuk mengembangkan BUMDes. Sehingga BUMDes mandiri secara ekonomi. Pendirian BUMDes tidak terlepas dari potensi desa yang mungkin selama ini belum tergali. Oleh karena itu, kajian (Sidik, 2015), memperlihatkan bagaimana kemudian potensi desa ini digali atau dikembangkan guna mewujudkan kemandirian desa. Dengan kebijakan pendirian BUMDes sedikit tidaknya memberikan keuntungan bagi masyarakat desa. BUMDes adalah satu bentuk implementasi kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Implementasi kebijakan menurut Grindle (1980) bahwa kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan sehingga implementasi kebijakan dapat dilakukan yang dilihat dari isi dan konteks kebijakannya (Wibawa, 1994). Implementasi yang akan dilakukan dalam isi kebijakan adalah; (1) kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, (2) jenis manfaat yang dihasilkan, dalam hal ini kebijakan memberikan manfaat yang actual (bukan hanya forma, ritual, dan simbolis), (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) siapa pelaksana program dan (6) sumber daya yang dikerahkan. Konteks kebijakan mempengaruhi proses Implementasi

sebagaimana pengaruh dari kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya; (1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, (2) Karakteristik lembaga dan penguasa, (3) Kepatuhan dan daya tanggap.

## VIII. ANGGARAN BIAYA

<b>Pembiayaan</b>	<b>Jenis</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jumlah</b>
Honor Enumerator	Penyebaran kuesioner	40 x Rp. 50.000	Rp. 2.000.000
	Uji coba kuesioner	10 X Rp.50.000	Rp. 500.000
			<b>Rp. 2.500.000</b>
Bahan/Perangkat Penunjang	Kertas A4 80 gram	10 rim x Rp. 50.000	Rp. 500.000
	Fotocopy Kuisisioner	3 lbr x 40 exemplar x Rp 150	Rp. 20.000
	Suvenir untuk Informan	40 Buah x Rp. 50.000	Rp. 2.000.000
	Papan survei enumerator	4 x Rp. 50.0000	Rp. 200.000
	Pulsa tim peneliti (3 orang) dan enumerator (4 orang)	4 x Rp. 100.000	Rp. 400.000
	Flash disk	3 buah x Rp. 150.000	Rp. 450.000
	Memory Card 16GB	1 buah x Rp. 300.000	Rp. 300.000
	Block Note	10 Buah x Rp. 20.000	Rp. 200.000
	Cartridge Hitam	3 x 250.000	Rp. 750.000
	Cartridge Warna	2 x 350.000	Rp. 700.000
	Pilot Ball Liner	3 Kotak x Rp. 100.000	Rp. 300.000
	Recorder Sony	1 buah	Rp. 930.000
	Batere recorder	5 pack x Rp.100.000	Rp. 500.000
			<b>Rp. 7.250.000,-</b>
Transportasi dan -akomodasi pra-survey dan tahap penelitian.	Biaya Sewa Kendaraan peneliti	1 mobil x 10 hari x Rp. 800.000,-	Rp. 8.000.000,-
			<b>Rp. 8.000.000,-</b>
Biaya Analisis Data, Publikasi dan penjiilidan	Copy/penjiilidan proposal	5 eks x Rp. 50.000	Rp. 250.000,-



## 8.2. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Tim Peneliti

Tabel 4. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Tim Peneliti

No	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Dr. Andy Alfatih, M.PA / 0024126003	Administrasi Publik, FISIP Unsri	Kebijakan Publik	6	1.Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penelitian 2.Mengolah dan analisis data dari perspektif kebijakan publik
2	Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si / 0001016025	Sosiologi, FISIP Unsri	Sosiologi	5	Mengolah dan analisis data dari perspektif sosiologi
3	Randi, S.Sos, M.Sos	Sosiologi, FISIP Unsri	Sosiologi	5	1.Mengedit dan merevisi hasil analisis dan laporan penelitian 2.Membuat manuscript dan mensubmit manuscript penelitian
4	Petugas Lapangan (enumerator)	Mahasiswa S2 Jurusan Administrasi Publik FISIP Unsri	Kebijakan Publik	4	Mencari data lapangan dan melakukan wawancara mendalam



## X. DAFTAR PUSTAKA

- Alfatih, Andy. 2015. *Program Implementation and Community Empowerment*. Unpad Press : Bandung.
- Alfatih, Andy, dkk. 2018. Pengaruh Implementasi Program Pembinaan Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Menengah (Studi Pada UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel di Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2017). Laporan Penelitian Kompetitif, LPPM, Universitas Sriwijaya.
- Alfatih, Andy, dkk. 2018. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018. Laporan Penelitian kerjasama dengan Pemerintah Daerah musirawas.
- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi, Volume 1. No.1
- Aneta, asna. 2010. *Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1. No.1.
- Creswell, J. W. 2016. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. 2016. *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Hapsari, Dyah. 2014, dkk. Kajian Akademis Pengembangan Potensi Unggulan Strategis Daerah Tertinggal Bantaran Sungai Komering Kabupaten OKU Timur. Laporan Penelitian Kerjasama dengan Pemkab OKU Timur.
- Nugroho, Riant D. 2016. *Public Policy*. Jakarta : Gramedia.
- Prasetyo, Ratna Aziz. 2017. Peranan BUMDes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dalam *Jurnal Dialektika*, Volume XI, No. 1 Maret 2016.  
<https://researchgate.net/publication/317088682>
- Ripley dan Franklin. 2015. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago : The Dorsey Press.
- Sidik, Fajar. 2015. Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa, dalam *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Universitas Gadjah Mada, 12/2015, Volume 19, Issue 2. DOI : 10.22146/jkap.7962.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta
- Sumiasih, Kadek. 2018. Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung) dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7. No. 4, Desember 2018. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>

Sufi, Wasiah dan Saputra, Trio. 2017. Implementation of Village Empower Program In Supporting Form of Institutions of Village Business Institution (BUMDes), dalam *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Universitas Jambi, 12/2017, Volume 5, Issue 2. DOI : 10.1234/ppd.v5i2.4420

Tim Penyusun. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.

Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wibawa, S., Purbokusumo, Y., & Pramusinto, A. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

### **Peraturan dan Undang-undang :**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Desa

**The Implementation of Policy on The Establishment and Management Procedure of  
Village-Owned Enterprise**

**[Study on Several Village-Owned Enterprises in Indonesia]**

Andy Alfatih, Dyah Hapsari ENH, Diana Dewi Sartika, Randi

**Abstract**

One of the efforts to obtain and increase village revenue was that the village must run a business through a village-owned enterprise [VOE]. To establish a village-owned enterprise, a policy was needed as an umbrella for the the establishment and the utilization of village resources. A Policy like this had been made by the Musi Rawas Regency Government, namely Musi Rawas Regency Regional Regulation Number 10 year 2013 concerning The Establishment and Management Procedure of Village-Owned Enterprises [VOEs]. This Regional Regulation had been implemented by villages in the Regency.

This study aimed to evaluate the implementation of the above-mentioned regional regulation. The results of data analysis showed that the implementation of the Musi Rawas Regency Regional Regulation Number 10 year 2013 concerning The Establishment and Management Procedure of Village-Owned Enterprises [VOEs] was successful. This could be seen from several indicators, namely:

1. There exists compliance of policy implementers towards the content of the policy [regional regulation of Musi Rawas Regency]. The degree of compliance was high with the score of 271 and was in the good category.
2. The establishment and management of VOEs [the smoothness of routine functions] was also high with the score of 236 and classified as good.
3. The performance of the management of VOEs was also good with the score of 268. The impact of policy implementation [regional regulation of Musi Rawas Regency] was positive / good with the score of 240.

**Key words:** implementation, regional regulation, success, degree of compliance, smoothness of routine functions, desired performance, desired impact.

**Background**

This study was on the implementation of policy, especially, Regional Regulations of Musi Rawas Regency Number 10 year 2013 concerning The Establishment and Management Procedure of Village-Owned Enterprises [VOEs] – hereinafter, this abbreviation will be used - in this article.

In order to utilize the village potentials and increase village income, the government of Musi Rawas Regency made a regional regulation to encourage villages in the District to establish village-owned enterprises [VOEs]. As the result, there were a few villages which had the enterprises. Nevertheless, the enterprises did not seem well developed. The phenomenons were, among others, as follows:

1. The product market was very limited
2. The management was less skilled
3. Village potential had not been widely used.

The products, like coffee powder, chocolate based products, traditional food products, variety of local fruits, hand crafts, were marketed only around the district. At best, they were purchased by outsiders when they visited the area.

In its relation to enterprises management, some chairpersons and board members were often split because they disagreed on something that was really not very basic. For example, on issues raised in meetings, determining a meeting place for them or whether the chairman must be present when decisions about some matters were about to be made, and some other technical things. Moreover, in carrying out an activity, it was often without planning. The supervisory system for business assets was also not implemented properly. For instance, some equipments were not in file or were, even, lost.

In terms of exploiting the village's potentials, this also seemed less encouraging. Most of the businesses engaged in trading. Only few merchandises which they sold or produced dealt with the natural wealth owned by the villages, such as, coffee, rubber tree-latex, local fruits, traditional food, chocolate fruit, palm fruit, and so on. Those enterprises sold merchandises in the forms of groceries, building materials, cellular telephones and the knick-knacks, modern cakes, equipment rental and wedding party supplies. In fact, one of the purposes of the local government to encourage the establishment of village-owned enterprises was the utilization of village potential in the form of local natural wealth.

### **Research Question**

Based on the description in the background above, there had been formulated the research questions which were how was the implementation of Musi Rawas Regency Regional Regulations Number 10 of 2013 concerning The Establishment and Management Procedure of Village-Owned Enterprises [VOEs] in the Regency? What critical factors affected the implementation of the regional regulation ?

### **The objectives of The Research**

This study aimed to determine how the implementation of Musi Rawas Regency Regional Regulations Number 10 of 2013 concerning The Establishment and Management Procedure of Village-Owned Enterprises [VOEs] in the Regency was. In addition to it, it was also meant to know the critical factors influencing the implementation.

### **Theoretical Frame-work**

In his latest book – the fifteenth edition – called *Understanding Public Policy*, Thomas R.Dye (2017) defined public policy as whatever governments choose to do or not to do.

Andy Alfatih [2010] in his book entitled *Program Implementation and Community Development* claimed public policy was any decision or action purposely as well as legally made or taken by governments for the sake of public interest, public problems solution, public empowerment, and social welfare.

In the work of Andy Alfatih [2010], public policies can be in various forms, such as constitution, act, regulations, decrees, government regulations in lieu of laws.

Relating to implementation, in Webster dictionary, it has been defined as put rules into actions or apply theory into practice.

Riant Nugroho Dwijiwijoto (2016) stated policy implementation is a way for a policy to achieve its objectives. Another definition says that “implementation is as the carrying out of a policy decision made by a public authority”, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983:7).

In a book entitled *Policy Implementation and Bureaucracy*, Randall B. Ripley and Grace A. Franklin [1986] wrote that successful policy implementation was measured by 3 parameters.

Namely: degree of compliance, smoothness of routine functions, and leading to the desired performance and impact..

These three parameters of successful policy implementation proposed in the work of Randall. B. Ripley and Grace A. Franklin were referd in evaluating or assessing the success of implementation of Musi Rawas Regency Regional Regulations Number 10 of 2013 concerning The Establishment and Management Procedure of Village-Owned Enterprises in the Regency.

According to Francine Rabinovitz, et al, in Alfatih (2012), the implementation has to follow 3 principles. Namely:

1. Policy implementation must refer to what is said in the policy accurately
2. Policy implementation must be able to raise the commitment of the policy implementors.

Policy implementation must be able to fulfill public’s wishes. Therefore, There must be a consensus between the implementor organization and prevailing political system

**Research Method**

It was a research with quantitative method. Therefore, the design followed was the one belonged to quantitative method, especially things related to technique of respondent determination , data collection instrument, questionnaire design, data validity and reliability, and approach in data analysis.

**Definition of Concepts**

**Public policy** –in this context – was Regional Regulations Number 10 of 2013 of Musi Rawas Regency concerning The Establishment and Management Procedure of Village-Owned Enterprises [VOEs] in the Regency.

**Compliance** is the subservience of the implementors of Musi Rawas Regency Regional Regulations Number 10 of 2013 concerning the establishment and management procedure of village-owned enterprises in the Regency.

**Function**, in this sense, was the works of establishing and managing procedure of Village-Owned Enterprises [VOEs] in the Musi Rawas Regency.

**Performance** was the achievements obtained in accordance with the referenced regional regulation mandate.

**Impact** was a logical consequence arising from the achievement of the regional regulation objectives.

**Operational Definition**

Table 1  
Operational Definition of The Variable

Variable	Dimensions	Indicators
<p><b>The implementation of Musi Rawas Regency Regional Regulations Number 10 of 2013 concerning the establishment and management procedure of village-owned enterprises [VOEs]</b></p>	<p><b>Degree of compliance</b></p>	<p>1. business fits to village potential            2. VOE estbalishment must be under village regulation            3. the establishment of voe based on consensus            4. the voe organization should be separated from the village government organization            5. The voe organization must consist of advisors / commissioners and operational executors            6. the village head acts as an advisor / commissioner</p>

	<p style="text-align: center;"><b>Smoothness of routine functions</b></p>          <p style="text-align: center;"><b>The realization of the desired performance and the desired impact</b></p>	<p>7. executor of operations consists of director / manager and head of business units</p> <p>8. business profits must be shared with the owners of capital</p> <p>9. The voe manager must make a report to the village head</p> <p>10. voe should be supervised by village representative body</p> <p>11. GCG must be applied by Voe management.</p> <p>1. availability of adequate capital</p> <p>2. availability of adequate human resources</p> <p>3. availability of adequate budget</p> <p>4. availability of proper work equipment</p> <p>5. availability of decent place of business</p> <p>6. availability of adequate tool</p> <p>1. an increase in village income</p> <p>2. the availability of business opportunities</p> <p>3. the utilization of village potential</p> <p>1. the ease in fulfilling the needs of the villagers</p> <p>2. the villagers more prosperous</p> <p>3. the image of the village government more positive</p>
--	--	---

It was necessary to note that if the indicators indicated good, it meant the dimensions were good. The good dimensions could be understood that the variable had been good, too. and in vice versa.

**The analysis unit and observation unit**

The analysis unit of this research was organization represented by one of the managers of the village-owned enterprise [VOEs]. While, the observation unit had been one of the managers who answered the questionnaire on behalf of the village-owned enterprise.

**Population**

There were 174 VOEs in Musi Rawas Regency which were the population of this study. Some of them were taken as samples.

**Sample**

Here, Sample was determined randomly by using a formula proposed by Slovin (Umar, 2004;103,107):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{174}{1+174(0,1)^2} = \frac{174}{2,74} = 63,50 = \mathbf{64}$$

Note: n = sample size  
 N = population size  
 e = 10 % rate of error

## Data and The Sources

### Data

By the kind, most data of this research were quantitative. Nevertheless, there also existed qualitative data as complement. In terms of sources of data acquisition, there were primary data and secondary ones.

### The Sources of Data

Primary data came mainly from the questionnaire and field observation as well. Meanwhile, the secondary data were sourced from documents, such as archives and reports.

### Validity and Reliability Test of Instrument

#### Validity Test of Instrument

The validity test is carried out to see whether the instrument (measuring instrument) used to obtain the data (measure) is valid. Valid means that the instrument can be used to measure what you want to measure (Sugiyono, 2010: 348). The technique used to test the validity of the instrument is to calculate the correlation value between the data on each statement and the total score using the product moment correlation technique formula (Umar, 2004: 83). The product moment correlation technique is an analysis used to determine the degree of relationship and contribution of the independent variable and the dependent variable. Product moment correlation analysis techniques includes parametric statistical techniques that use interval and ratio data with certain requirements. The followings are the steps and the Product Moment Correlation formula (Riduwan, 2010: 84,111):

1. Calculating the correlation of each item by making use of product moment formula as follows

$$r_{hitung} = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{[n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2][n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2]}}$$

Where: r value = correlation coefficient

$\sum X_i$  = Total score of items

$\sum Y_i$  = Total total score (all items)

n = Number of respondents.

2. Comparing the calculated r value with the r table to determine the significance if  $\alpha = 0.05$  and  $dk = n - 2$  through a one-party test.
3. If r value > r table means the research instrument is valid, and if r value < r table means the research instrument is invalid.

The validity of the instrument can be seen from the interpretation criteria regarding the correlation index (r). The following table of correlation index (r):

Table 2  
 Interpretation of the Correlation Coefficient of r Value

Coefficient Interval	Relationship Level
0,800 – 1,000	Very high
0,600 – 0,799	High
0,400 – 0,599	High enough
0,200 – 0,399	Low
0,000 – 0,199	Very low (invalid)

Source : Riduwan (2010:110)

Based on the table of validity test results, it showed that all the values of the r coefficient of the instrument for the dimensions of degree of compliance, smoothness of routine functions, and the realization of the desired performance and the desired impact had a value > r tabel which was 0.359 – ranging from 0,7448 to 0,945 - which meant that all instrument from these dimensions were declared valid. This showed that all items used as indicators of implementation policy [regional regulation] based on perceptions were valid as a measuring tool.

### Reliability Test of Instrument

Reliability is the level of confidence in the a measurement results. Measurements that have high reliability - it means that the measurements are able to provide consistent (reliable) measurement results - can provide relatively the same results if measurements are made at different times. Reliability is one of the main characteristics or characteristics of a good measuring instrument. Reliability provides an overview of the extent to which a measurement can be trusted. It means the extent to which the measurement result score is free from measurement error. High reliability is empirically indicated by a number called the reliability coefficient. Theoretically, the coefficient of reliability ranges from 0.00 - 1.00.

A reliable instrument is an instrument that, when used several times to measure the same object, will produce the same data (Sugiyono, 2005: 110). The test used in this study will be the Alfa Cronbrach technique. Reliability testing with the Cronbach Alpha technique is carried out for the type of interval data (Sugiyono, 2010: 365; Umar, 2004: 95). The formula for the Cronbach Alpha reliability coefficient is as follows:

$$r_i = \left( \frac{k}{k-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Where:

ri = instrument reliability

k = the number of questions

$\sigma_t^2$  = total variance

$\sum \sigma_b^2$  = the number of item variances

The alpha steadyness measure can be interpreted in the following table:

Table 3

#### The Interpretation of Reliability Level

Alpha Cronbach Values	Reliability Levels
0,00 s.d. 0,20	Less Reliable
0,21 s.d. 0,40	Somewhat Reliable
0,41 s.d. 0,60	Reliable enough
0,61 s.d. 0,80	Reliable



0,81 s.d. 1,00	Very Reliable
----------------	---------------

Source : Triton, in Sujianto (2007:91)

Reliability test in this study used the reliability formula of the Cronbach's Alpha measuring instrument. The instrument is declared reliable if the Cronbach's Alpha value is  $\geq 0.61$ . Based on the results of the reliability test carried out on the statement of perceptions items to 20 respondents, it showed the value of Cronbach's Alpha  $\geq 0.61$  - ranging from 0, 766 to 0, 886 - which meant that the statements from the degree of compliance, smoothness of routine functions, and the realization of the desired performance and the desired impact were reliable. Therefore, all questionnaire statements were used to determine the policy [regional regulation] implementation.

**Techniques of Data Collection:** Questionare spreadings, on the spot observation, and document study.

### Research Instrument

The research instrument used was a questionnaire. The determination of the score used Likert scale. Riduwan [2009: 20], stated that with Likert scale the variables to be measured were translated into dimensions and the dimensions were further translated into measurable indicators. The reason for using Likert scale in this study was because in its use, Likert scale could be made and interpreted easily and it was a form of measurement commonly used. The raw data obtained was in the form of numbers and then interpreted in a qualitative sense. For quantitative analysis, the alternative answers using Likert scale were given a score of 1 to 5. Thus, there were 5 alternative answers to perception, namely, by the score categories: Score 1, categorized as Strongly Disagree, Score 2 Disagree, Score 3 Neutral, Score 4 Agree Score 5, categorized as Strongly Agree.

**Technique of Data Analysis:** Descriptive quantitative technique. It was done by displaying data, assessing them, delivering argument, quoting theory for justification and confirmation, and taking conclusion [Alfatih, 2018]

### Results and The Analysis:

Before doing analysis, it was very essential to make score range in order to create quality categories of each indicator– and later for quality category average of each dimension. The steps of categorizing the indicator quality average were as follows:

1. The cumulative score for each statement item was the total score of each statement item which was the answer of 64 respondents.
2. To get a cumulative score, the number of respondents is multiplied by the largest and smallest score scale on the rating scale. The largest scale score was 5 while the smallest scale score was 1, the calculation was:

The highest cumulative score was  $64 \times 5 = 320$

The smallest cumulative score was  $64 \times 1 = 64$ .

3. To obtain a range of score, the highest cumulative score was subtracted from the smallest cumulative score then the result was divided by the number of grading scales, where  $320 - 64 = 256$ , and  $256 \div 5 = 51.2 =$  The res 51. The results could be seen in Table 4.

**Table 4**

#### Indicator Quality Classification Based on Assessment Score-Ranges Category

Score Ranges	Categories
64-115	Not very good
116-167	Not good
168-219	Sufficient

220-271  
>272

Good  
Very good

The data were analyzed by the dimension. It was started from the first dimension.

### The Degree of Compliance to The Content of The Regional Regulation

One of the goals of establishing a Village-Owned Enterprise [VOE] as mandated in the regional regulation studied was to utilize the potential of the village. In common, villages in Musi Rawas Regency were located near forests, mountain, hill, rivers or some of them. It was, therefore, the villages had good potentials. Regarding whether the businesses run by VOEs were suitable with the village potentials, the answers of the respondents were as follows.

**Table 5**  
**Quantitative Overview of Degree of Compliance to The Regional Regulations**

No	Statements	Answer options					FS	RS	Percent- age
		SD (1)	D (2)	N (3)	A (4)	SA (5)			
1.	Business fits to village potentials	20	15	7	15	7	<b>166</b>	320	100%
2.	VOE estbalishment must be under village regulation	0	0	0	40	24	<b>280</b>	320	100%
3	The establishment of voe based on consensus	0	0	0	21	43	<b>299</b>	320	100%
4	VOE should be separated from the village government	0	0	2	22	40	<b>294</b>	320	100%
5	VOE must consist of advisors and operational executors	0	0	0	24	40	<b>296</b>	320	100%
6	Village head acts as an advisor / commissioner	17	15	0	10	22	<b>197</b>	320	100%
7	operation executor consists of manager & business unit head	0	0	0	10	54	<b>310</b>	320	100%
8	Profit must be shared with the capital owners	0	0	7	27	30	<b>279</b>	320	100%
9	VOE manager must make a report to the village head	0	0	0	10	54	<b>310</b>	320	100%
10	VOE be supervised by village representative body	4	5	5	20	30	<b>259</b>	320	100%
11	GCG must be applied by Voe management	0	0	0	33	31	<b>287</b>	320	100%
	Avarage Score	-	-	-	-	-	<b>271</b>	-	100%

**Source :Questionnaires, 2018.**

Annotation: Frequency Score [FS] = Answer option x score

Result Score [RS] = Number of Respondent x 5

Average Score = (FS X 100%) : RS

Table 5 above showed that the frequency score of indicator of 'business fits to village potentials' was at 166. It meant 65.5% of respondent disagree to the statement. Referring to table 4 concerning indicator quality classification based on assessment score-ranges category, it was categorized to Not Good. In terms of compliance, most of the VOEs disobeyed the policy, the regional regulation. It was because they have another perception about the business of VOEs. Some of the reasons of most respondents' disagreement to this provisions of this regional regulation were because the villages' potentials were limited only to certain kinds of natural resources available in the village, such as cocoa, coffee, rubber plantation, oil palm plantation and river fish. Meanwhile, the needs of villagers were very diverse. This gap was what they perceive as a very promising business opportunity. After all, if all VOEs were to do the same businesses, the prices of the products would be cheap due to the abundant supply. The reasons of those disagreement respondents were reasonable, since in business, attracting customers through products was very essential for business progress and profit. As Neil Kokemuller [2018] stated in his article that "product differentiation means that your product has one or more distinct attributes that separate it from competitors. While having a quality product is good, being able to develop and articulate the qualities or features that clearly make one product better than the competition is important to attracting value-oriented consumers. " It was clear that in terms of the first indicator there was no compliance. Regarding the second indicator, VOE establishment must be under village regulation. All - 100 % - respondents complied to that. The score was 280 and classified as Very Good. It made sense because technically only village regulation could regulate village needs in detail and accommodatively. The next indicator had been 'the establishment of voe based on consensus'. For this, 100 % respondents agreed. The score was at 299 which was understood as Very Good. It could be like this because concensus in making making decisions philosophically had been Indonesia way. It was accordance with Pancasila [five principles] as the Indonesian ideology. It could be concluded that the compliance was there and the degree was high. While, the perception of respondents on VOE should be separated from the village government, it was in Very Good category. The percentage was 100% and the score was 294. It was acceptable that the management of the two affairs must be separated. Different organization with disparate tasks should have each own management to avoid conflict of interest. The fifth indicator, VOE must consist of advisors and operational executors, was well supported by all respondents. They agreed very much on this for the executors needed some advice to direct the works to the goals. As the result, 100% or all 64 respondents answered agree and strongly agreed to the statement proposed. The score was 296 and was classified to Very Good. When another expression - Village head acts as an advisor / commissioner - submitted to the respondent, only 50% or 32 persons approved. While another 50% refused. The score was 197. It was in the score range between 168 and 219 which meant that it was in the category Sufficient. When this result was further investigated, the unsupportive respondents answered that the Village Head should just focus on his job as the village head, so that he could work professionally. Meanwhile, the supporting data source argued that as a village head it was reasonable that he became a commissioner for VOE in his village. The next sentence said "operation executor consists of manager & business unit head". To this, most respondents – 54 people – strongly agreed. Another 10 respondents just agreed. The score was 310 and was categorized Very Good. It's common if those 2 basic units existed in a business enterprise. The eighth indicator of the dimension of the degree of compliance had been "Profit must be shared

with the capital owners“. The score of the measure was 279 and was in the position Very Good. By percentage, 89% respondents complied this rule. Profit sharing was a common practice among share holders. Hereinafter, the 64 respondents were requested to answer this statement, VOE manager must make a report to the village head. It resulted in all respondents supported this. The obeyed provision. It was put in Very Good classification because the score was 310. Another obedience happened was the VOEs caretakers did not mind to be supervised by another side that was Village Representative Body. It was proved when they were to answer this statement, VOE be supervised by village representative body, most of them – 50 respondents or 78% - supported it. The score was 259. Therefore, it classified into Good. Last but not least was the final indicator of the degree of compliance. It was GCG must be applied by Voe management. To this statement, all respondents advocated their acceptance. The fact that 33 answers showed agree. Another 31 indicated strongly agree. It could be understood that 100% respondent complied this article. This indicator was placed in Very Good level. The score was 287. Relating to the importance of compliance in work, Gary Trainor [2012] supported Ripley and Franklin by stating “when it comes to a business and corporate management, **compliance** refers to the company obeying all of the legal laws and regulations in regards to how they manage the business, their staff, and their treatment towards their consumers. The concept of *compliance* is to make sure that corporations act responsibly. When it comes to a business and corporate management, **compliance** refers to the company obeying all of the legal laws and regulations in regards to how they manage the business, their staff, and their treatment towards their consumers. The concept of *compliance* is to make sure that corporations act responsibly”.

It needs to be reminded here that if the indicator is positive then the dimensions will be positive as well. It is because the indicator has become the measure of the dimension. Vice versa.

From the discussion, it could be found that there was one indicator – the first indicator – was classified Not Good. One indicator, the sixth indicator, had been Sufficient. Another one indicator – indicator number 10 - was grouped into Good. There existed 8 indicator had been categorized into Very Good. The average score of the degree compliance dimension was 271 and was categorized Good. In general, there were 9 indicators showed compliance and it was very high. It could be concluded that in terms of the degree compliance, referring to the theory proposed in the work of Randall. B. Ripley and Grace A. Franklin, the implementation of Musi Rawas Regency Regional Regulations Number 10 of 2013 concerning The Establishment and Management Procedure of Village-Owned Enterprises in the Regency had been successful.

The next indicators that would be analyzed were those belonged to the second dimension, smoothness of routine functions. They would also be discussed one after another. For the data, see table 6.

Table 6  
Quantitative Overview of Smoothness of Routine Functions

No	Statements	Answer options					FS	RS	Percent- age
		SD (1)	D (2)	N (3)	A (4)	SA (5)			
1.	Availability of adequate capital	8	10	11	31	4	<b>175</b>	320	100%
2.	Availability of adequate human resources	5	5	7	27	20	<b>244</b>	320	100%

3	Availability of adequate budget	4	7	13	30	10	<b>227</b>	320	100%
4	Availability of proper work equipment	4	5	11	20	24	<b>247</b>	320	100%
5	Availability of decent place of business	2	4	2	40	16	<b>256</b>	320	100%
6	Availability of adequate tool	2	4	4	24	30	<b>269</b>	320	100%
	Total score	-	-	-	-		<b>236</b>	-	100%

**Source :Questionnaires, 2018.**

Annotation: Frequency Score [FS] = Answer option x score  
Result Score [RS] = Number of Respondent x 5  
Score = (FS X 100%) : RS

Data in table 6 above, especially those related to the availability of adequate capital for VOEs in Musi Rawas Regency, indicated that some respondents refused that statement. It meant in their perception it was not right. Nevertheless, most of the respondents had quite different point of view from those who disagreed. They, as much as 54.69%, were so sure and supported the statement. This first indicator of smoothness of routine functions was on Sufficient level because the score was only 175. Regardless the adequate business capital, the fact that those VOEs still run their businesses and were always ready to get aids from any side for more capital.

Unlike the first indicator, the second parameter of smoothness of routine functions dimension seemed a little bit better. There existed 47 respondents or 73.44 % who were so confident with human resource adequacy of VOEs of the District of Musi Rawas. The management of each VOE had diverse number of caretaker ranging from 6 to 12 persons depending on the business run, location, operation longevity, and size. The VOEs whose business related to village natural wealth, like rubber tree or palm oil plantations, needed more employees compared to those selling groceries or others. The score of this indicator had been 244 and was in Good category.

The next point of analysis was budget. Budget had been quite dissimilar from capital. It was a part of capital. Not all capital had become budget. Concerning the say 'VOEs had adequate budget or availability of adequate budget, 62.51% or 40 respondents thought it was true. It was proved by the fact that the VOEs still run their businesses somewhat well. The score of this part was not that bad. The figure was 227 and was in Good as well.

The fourth indicator denoted that it was in the position of Good. It was symbolized by its score which was 247. There were 44 respondents who supported the statement "availability of proper work equipment" which meant that the VOE which they worked for had feasible working tools. The respondents were knowledgeable about their VOEs and had authority to represent their VOEs. Therefore, their opinions should be heard. From 64 respondents, 87% of them supported the proposed statement.

Infrastructure is something that is very decisive for the success of the job. If the condition was inadequate, the work atmosphere will be uncomfortable. It could lead to working failure. When respondents were asked to answer the sentence whether places of business of the VOEs were decent [availability of decent place of business], 94% supported – 40 respondents agreed. Another 16 ones strongly agreed. Over this situation, the score of the fifth indicator was 256. It went to Good classification.

Besides decent business place, working tools played also a very important role to determine success. The VOEs management, therefore, should give much attention on them. When the respondents were to choose one out of five answer options - strongly disagree [SD], disagree [D], neutral [N], agree [A], strongly agree [SA ] - to the statement “availability of adequate tools”, it could be found out 2 respondents strongly disagreed, 4 disagreed, 4 were neutral, 24 agreed, and another 30 strongly agreed. It could be seen that most respondents – 54 persons or 84.4% - supported that statement. As a whole, the score was 269 and it was classified into Good category.

Work is fun and meaningful, if every thing runs smoothly. Meaningful work encourages performance accomplishment. Regarding meaningful work, Jessica Van Wingerden and Joost Van der Stoep [2018] claimed meaningful work has a positive relationship with an employee’s performance in several and interrelated ways, via employees’ use of strengths, via work engagement, and via strengths use affecting work engagement.

The discussion above provided the following information, namely:

1. 54.69% [35 people] respondents had no objection on the sentence that said there was “availability of adequate capital“ for the VOEs. The indicator category was Sufficient.
2. Indicator “availability of adequate human resources“ of the VOEs was in Good level. It was supported by 47 out of 64 respondents or 73.44 %.
3. The position of the third parameter had been Good as well due to its 227 score.
4. There were 44 respondents who supported the statement "availability of proper work equipment". It was at 247 score and was Good.
5. The score of the fifth indicator was 256. It went to Good classification.
6. 54 persons or 84.4% supported the statement "availability of adequate tools”. As a whole, the score was 269 and it was classified into Good category.

It was obvious that the second dimension - the smoothness of routine functions - of successful policy implementation had been Good with the score was 236.

Referring to the theory presented by Randall. B. Ripley and Grace A. Franklin, it could be concluded that - in terms of the smoothness of routine functions - the implementation of the policy, the regional regulation, had been successful.

Finally, it came to the last dimension of successful regional regulation implementation which was the desired performance and impact. The analysis was begun from the desired performance. The collected data were as follows.

Table 7  
Quantitative Overview of The Desired Performance

No	Statements	Answer options					FS	RS	Percent- age
		SD (1)	D (2)	N (3)	A (4)	SA (5)			
1.	An increase in village income	2	5	13	22	22	<b>249</b>	320	100%
2.	The availability of business opportunities	0	0	0	10	54	<b>310</b>	320	100%
3	The utilization of village potential	10	5	5	9	35	<b>246</b>	320	100%
	Total score	-	-	-	-	-	<b>268</b>	-	100%

**Source :Questionnaires, 2018.**

Annotation: Frequency Score [FS] = Answer option x score  
Result Score [RS] = Number of Respondent x 5  
Score = (FS X 100%) : RS

Assessing performance had been extremely essential to do. In order to find out the obtained performance whether it had reached as it should be or not. DeNisi, Angelo S. and Pritchard, Robert D.; 2015 said “designing and implementing appraisal and performance management systems whose goal is performance improvement is something very important”.

Data in table 7 were related to the scores of 3 indicators of the desired performance dimension of successful implementation of regional regulation in Musi Rawas Regency.

When they were asked to answer the statement "an increase in village income" which meant the income of village increased due to VOEs business, quantitatively, there were 44 or 69% respondents who supported that statement. It showed that the business of VOEs had been successful and earned some profit and some of the profit went to village government bank account. It made village budget increasing. VOEs' businesses which tended to be profitable were those related to daily needs, like groceries supply, raw material for construction, tool rental, wedding facilities rental, and others. Meanwhile, other businesses related to the natural wealth of the village - for example, rubber tree sap, oil palm fruit, ground coffee, cocoa-based products, and fresh fish-based foods - were also profitable, but they were volatile. The profits were volatile because the state of this business depended on the season, demand and prices in the market.

The second indicator of the desired performance dimension had been "the availability of business opportunities". To this statement, all respondents [100%] gave their back up. They agreed that the establishment of VOEs created business opportunities for the concerned villagers . The villagers could become suppliers for the VOE in their village or work for the VOE itself. So, this indicator was classified into Very Good category.

The last indicator had been the utilization of village potential . The answer of the respondents varied, like 10 respondents strongly disagreed, 5 persons disagreed, 5 answers showed doubtnes, 9 said agreed, and another 35 participants strongly agreed. From the data, it could be seen that over all, most respondents, 44 persons or 69%, supported the statement. For this, the score was 246 and categorized into Good. Some of the respondents seemed against the proposed statement because currently there were so many kinds of merchandise or products were sellable. Not only limited to the natural wealth owned by the village.

The discussion on the 3 indicators of the desired performance dimension above indicated that the score of the first indicator was 249, the next one had been 310, and the last parameter was 246. On average, the score of dimension of the desired performance had been 269 and it was in the position of Good. It implied that the desired performance had been accomplished. If the implementation of a policy caused performance good, it could be concluded – refer to the theory of Randall. B. Ripley and Grace A. Franklin – that the implementation was successful.

Finally, the analysis came to the desired impact, as a part of the last dimension of successful policy implementation. This dimension consisted of 3 indicators as well. They were the ease in fulfilling the daily needs of the villagers, the villagers more prosperous, and the image of the village government more positive. The data about the 3 indicators could be seen in the following table.

Table 8  
Quantitative Overview of The Desired Impact

No	Statements	Answer options					FS	RS	Percent- age
		SD (1)	D (2)	N (3)	A (4)	SA (5)			
1.	the ease in fulfilling the daily needs of the villagers	4	4	2	30	24	<b>258</b>	320	100%
2.	the villagers more prosperous	7	8	5	40	4	<b>218</b>	320	100%
3	the image of the village government more positive	5	5	5	30	19	<b>245</b>	320	100%
	Total score	-	-	-	-	-	<b>240</b>		100%

**Source :Questionnaires, 2018.**

Annotation: Frequency Score [FS] = Answer option x score  
Result Score [RS] = Number of Respondent x 5  
Score = (FS X 100%) : RS

The score belonged to the first indicator - the ease in fulfilling the daily needs of the villagers - in table above was 258. It was in the category Good. The reasons of getting support from 54 people because since the VOEs existed in their villages, some of their daily needs, such as groceries, building materials, cellular telephones and the knick-knacks were easier to get. It seemed that the excuses were so simple, but they were factual. The residents of some villages used to be hard to get some of their daily life since some villages were difficult to reach or some were unreachable through land transportation - like Sri Pengantin, Belani, and Napallicin villages - because the condition of roads were extremely bad. Some villages, even, had no access to land transportation. They were very isolated. They took river transportation, instead.

In its relation to the second indicator, from 64 respondents, only 69% of them supported the statement “the villagers [became] more prosperous”. When they were asked whether it was true that the villagers became more prosperous due to the existence of the VOEs, they answered yes since they could fullfil some of their daily needs more easily. In their perception, the easier way to fullfil their daily needs was understood as being more prosperous. It was that simple. The score of this indicator was only 218, it was categorized into Sufficient, then.

Last but not least was the last indicator of the last dimension. It was “the image of the village government more positive”. There were 49 out of 64 respondents who said that. They considered making VOEs available in their villages meant the village governments did really their works and it was good. The score was 245 and it was in the Good category. A village having a VOE had been a prestige both for the village itself and the residents as well. A VOE was a symbol a progress – just like a super market in a city area. Unlike, traditional groceries stalls, a VOE had better building, located at a considered strategic place, had become a gathering point for young people, and – off course – selling more merchandises.

The scores of the three indicators - of the desired impact dimension – were various. They were 258, 218, and 245. On the avarage, the score had been 243. It belonged to the dimension of the desired impact. This score was between 220 – 271 – see table 4 – and was classified into Good category.



The theory - by Randall. B. Ripley and Grace A. Franklin - referred saying the success of policy implementation is measured by 3 parameters or dimensions, namely the degree of compliance [to the policy content], the smoothness of routine functions [the establishment and management of VOEs], and the realization of the desired performance and impact. From data analysis, it could be found the following information:

1. There existed compliance of policy implementers towards the content of the policy [regional regulation of Musi Rawas Regency]. The degree of compliance was high with the score of 271 and was in the good category.
2. The establishment and management of VOEs [the smoothness of routine functions] was also high with the score of 236 and classified as good.
3. The performance of the management of VOEs was also good with the score of 268. The impact of policy implementation [regional regulation of Musi Rawas Regency ] was positive/good with the score of 240.

### **Factors Influencing The Implementation**

Theoretically, especially according to George C. Edwards III [1980], there were some critical factors influencing a policy implementation. They were: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Nevertheless, practically, particularly those relating to this study, the factors had not been found out until the research itself carried out.

Having collected data, the factors affecting the success of Musi Rawas Regional Regulation could be known. Namely:

1. Low competition. The VOEs competed only with traditional stalls in the villages.
2. Perception. The villagers, the young ones, buying things in VOEs had been more fun and prestigious than spending money at traditional stalls.
3. For some VOEs, village isolation influenced the success since the buyers had no more place to go to.

### **Conclusion**

From the analysis above, it could be concluded that the implementation of Regional Regulation of Musi Rawas Regency Number 10 year 2013 concerning The Establishment and Management Procedure of Village-Owned Enterprises [VOEs] was successful.

Factors influencing the success of the Musi Rawas Regency regional regulation were low competition, perception, and village isolation.

### **Bibliography**

- Alfatih, Andy. ; 2010; Implementasi Program dan Pemberdayaan Masyarakat or in english, Program Implementation and Community Development. Bandung: Unpad Press.
- Alfatih, Andy; 2012; The Failure of Policy Implementation in Indonesia and The Breakthrough. *International seminar and conference on innovative government*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Alfatih, Andy; 2019; Simple guidelines for carrying out quantitative descriptive research; Sriwijaya University Press; Palembang.
- DeNisi, Angelo S. and Pritchard, Robert D.; 2015; performance appraisal, performance management and improving individual performance: a motivational framework; *Management and Organization Review*; Volume 2, Issue 2.
- Dye, Thomas R.; 2017; Understanding Public Policy, 15th Edition; Florida State University, Florida

Edwards III, George C.; 1980; Implementing Public Policy; Congressional Quarterly Press publisher, Washington D.C.

Kokemuller, Neil; Advantages and Disadvantages of Product Differentiation, Azcentral, part of the USA today network, April 2018.

Riant Nugroho, 2016, Kebijakan Publik di Indonesia, Penerbit : Pustaka Pelajar, Jakarta

Riduwan, 2010. Method and Technique of Writing Thesis. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sujianto, Agus Eko; 2007; Statistics Application with SPSS for Beginner; Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta

Sugiyono. 2010. Statistics for Research. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Trainor, Gary; 2012; Importance Of Compliance In Business; How to Learn.Com.; August, 2012

Umar, Husein; 2004. Research Method in Administration; PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Wingerden, Jessica Van and Stoep, Joost Van der; 2018; The motivational potential of meaningful work: Relationships with strengths use, work engagement, and performance, Plos One an open access journal, June 2018.

### **Regulation**

Musi Rawas Regency Regional Regulations Number 10 of 2013 concerning The Establishment and Management Procedure of Village-Owned Enterprises.